

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Krisis Keuangan Asia diawali dengan jatuhnya mata uang Baht Thailand pada Juni 1997, akibat ulah para spekulan. Pada saat itu spekulan menjual mata uang Bath dengan harapan dapat menurunkan harga bath yang berharga 26 Bath per 1 Dollar Amerika. Pada akhirnya keinginan para spekulan tersebut berhasil. Karena banyak Bath yang keluar, maka pemerintah Thailand harus membeli mata uang Bath dan menghabiskan cadangan devisa sebesar USD 6,8. Pada Januari 1998, harga Bath jatuh dengan harga 54 Bath per Dollar Amerika.<sup>47</sup>

Sebelumnya, pada akhir tahun 1996, tibalah masa jatuh tempo pembayaran utang perusahaan-perusahaan swasta di Thailand. Karena pada saat itu banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka timbul lah ketidakpercayaan di kalangan perbankan Jepang terhadap kapabilitas perusahaan Thailand. Beberapa bank Jepang mempercepat jatuh tempo pembayaran utang. Akibatnya, masa jatuh tempo pelunasan utang terakumulasi dalam periode yang sama. Ketidakmampuan perusahaan swasta Thailand dalam memenuhi kewajibannya membuat nilai saham perusahaan-perusahaan itu jatuh.

Krisis di Thailand membawa pengaruh di Filipina. Bank sentral Filipina menaikkan suku bunga sebesar 1,75 persen pada Mei 1997 dan 2 persen lagi pada 19 Juni 1997. Pada 3 Juli, bank sentral Filipina dipaksa IMF untuk campur tangan dalam menjaga kestabilan Peso Filipina, kemudian bank sentral Filipina mengikuti perintah IMF dengan menaikkan suku bunga

---

<sup>47</sup> *Thailand Financial Crisis, it's causes, consequences and implications*, March 2007.  
[http://findarticles.com/p/articles/mi\\_qa5437/is\\_1\\_41/\\_ai\\_n29325863?pg\\_2/?tag=content;col1](http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_1_41/_ai_n29325863?pg_2/?tag=content;col1).

dari 15 persen ke 24 persen hanya dalam waktu satu malam saja. Tak berhenti di Filipina, krisis lalu menjalar ke Hong Kong.

Pada 15 Agustus 1997 seperti yang terjadi di Filipina, suku bunga Hong Kong naik dari 8 persen ke 23 persen dalam waktu yang sangat singkat. Pada Oktober 1997, dolar Hong Kong yang sebelumnya dipatok HK\$7,8 per USD mendapatkan tekanan spekulatif karena inflasi Hong Kong lebih tinggi dibanding Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Pemerintah setempat menghabiskan lebih dari US\$ 1 miliar untuk mempertahankan mata uang lokal. Meskipun adanya serangan spekulasi, Hong Kong masih dapat mengatur mata uangnya yang dipatok ke dolar AS. Pasar modal Hong Kong menjadi tak stabil, antara 20 sampai 23 Oktober, Index Hang Seng jatuh hingga 23 persen.

Korea Selatan yang menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-11 dunia, turut menerima imbas krisis Thailand. Meski fundamental ekonomi makro Korsel sangat baik, namun sektor perbankannya dibebani kredit macet luar biasa. Angka *Non Performing Loan* atau NPL yang sangat tinggi mengakibatkan banyak perusahaan Korsel yang mengalami jatuhnya nilai saham, atau bahkan diakuisisi oleh perusahaan lain. Contohnya pada Juli 1997, Kia Motors yang notabene merupakan produsen mobil terbesar ketiga di Korea, terpaksa meminta pinjaman darurat kepada perbankan. Bursa efek Seoul jatuh sebesar 4 persen pada 7 November 1997. Sehari kemudian, bursa jatuh kembali hingga mencapai angka 7 persen, penurunan terbesar sepanjang sejarah negara tersebut. Pada 24 November, pasar modal jatuh lagi hingga 7,2% karena adanya kekhawatiran IMF akan meminta reformasi yang membebani ekonomi Korsel. Peringkat kredit Korea Selatan turun dari A1 ke A3 pada 28 November 1997, dan turun lagi menjadi B2 pada 11 Desember. Pada tahun 1998, Hyundai Motor mengambil alih Kia Motors.

Di Malaysia, negara ini mengalami defisit anggaran hingga 6 persen. Pada bulan Juli 1997, Ringgit Malaysia

diserang oleh para spekulator. Untuk menyikapi serangan itu, Pemerintah Malaysia mengambil kebijakan mata uang mengambang atau *floating exchange rate*, tetapi akibatnya justru Ringgit Malaysia anjlok secara drastis pada 17 Agustus 1997. Empat hari kemudian Standard and Poor's menurunkan peringkat utang Malaysia. Seminggu berselang, peringkat Maybank juga ikut turun, padahal Maybank adalah bank terbesar di Malaysia. Di hari yang sama, bursa efek Kuala Lumpur jatuh 856 poin, dan menjadi titik terendahnya sejak 1993. Pada 2 Oktober, Ringgit kembali terjungkal dan membuat Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad harus mengambil kebijakan. Meski demikian, mata uang Ringgit tetap saja jatuh lagi pada akhir 1997 ketika Mahathir Mohamad mengumumkan bahwa pemerintah Malaysia akan menggunakan RM 10 miliar untuk membiayai proyek jalan, rel, dan saluran pipa. Pada 1998, pengeluaran di berbagai sektor menurun. Sektor konstruksi menyusut 23,5%, produksi menyusut 9%, dan agrikultur 5,9%. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara ini turun 6,2% pada 1998. Meski ikut mengalami dampak negatif krisis finansial Asia 1997, Malaysia merupakan negara tercepat yang pulih dari krisis ini karena menolak bantuan IMF.

Sebelum terkena dampak dari Thailand, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Menurut catatan Bank Dunia angka kemiskinan di Indonesia menurun dari tahun ke tahun, hingga mencapai 11% dari total penduduk saat itu 11 juta jiwa.<sup>48</sup> Disamping itu, program Keluarga Berencana juga dinyatakan berhasil mengurangi angka kematian bayi dari sebelumnya 118 kematian per 1000 kelahiran menjadi hanya 52 kasus kematian. Keberhasilan pembangunan juga ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup yang semula di kisaran 48 tahun menjadi pada kisaran 64 tahun.

---

<sup>48</sup> Weber, E.J. *The IMF and Indonesia: Two Equal Partners*, 1998.

Pada Juni 1997, Indonesia mulai mengalami pengaruh krisis Thailand. Tercatat di awal 1997 nilai rupiah stabil di kisaran Rp2000-2300/US\$ lalu menukik tajam hingga lebih dari Rp10000/US\$ dalam waktu satu tahun. Dari situ diketahui pula bahwa ternyata utang korporasi swasta di Indonesia mencapai US\$75 miliar. Selain itu system perbankan di Indonesia juga dinyatakan gagal karena banyak diintervensi oleh kepentingan politik. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus lebih dari US\$900 juta, dan juga cadangan devisa lebih dari US\$20 miliar.

Namun sayangnya, ternyata banyak perusahaan Indonesia yang meminjam ke luar negeri atau berutang dalam bentuk dolar AS. Pada 14 Agustus 1997, Pemerintah RI mengganti kebijakan pertukaran mengambang teratur dengan pertukaran mengambang bebas, akibatnya Rupiah terperosok semakin dalam. IMF kemudian datang dengan bantuan US\$23 miliar, dengan syarat-syarat tertentu diantaranya adalah penghapusan monopoli perdagangan dan industri, dan juga penghapusan subsidi pemerintah terhadap beberapa jenis komoditas.

China sebagai salah satu negara yang berada di Kawasan Asia yang tidak terdampak terlalu parah oleh krisis keuangan tersebut di sebabkan oleh penerapan sistem perekonomian pintu terbuka atau *open door*. Pada tahun 1978 sampai pada tahun 2008, China mengalami masa transisi yaitu dari sistem ekonomi terpusat yang diikuti industrialisasi Uni Soviet, yang kemudian menjadi sistem ekonomi pasar. Pada masa kepemimpinan Deng Xioping, Cina mulai mengadopsi kebijakan yang pragmatis dengan menjadikan ekonomi domestik sebagai fokus utama politik luar negerinya, melalui penerapan *open door policy*. Pada awal tahun 1990-an, Cina membangun perekonomiannya melalui perdagangan, bantuan luar negeri, serta *Foreign Direct Investment*. Kondisi ini memantapkan Cina untuk semakin meluaskan pasar dalam pasar global, melalui penggabungan dengan WTO, World Bank, The Asian Development Bank, dan APEC. Transformasi

ekonomi dan integrasi Cina dalam pasar global menjadi salah satu perkembangan ekonomi dunia yang sangat dramatis. Pertumbuhan produk domestik Cina rata-rata hampir mencapai angka delapan persen dan membuat Cina menempati peringkat enam besar ekonomi dunia.

Melesatnya pertumbuhan ekonomi Cina diikuti dengan kondisi yang agak memprihatinkan seperti kondisi perbankan yang memiliki kredit bermasalah, pengangguran, dan juga ketimpangan pendapatan dalam negeri, antara daerah pusat dengan daerah nonpusat. Krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998, misalnya, ditanggulangi forum National People's Congress dengan meredefinisi perusahaan melalui privatisasi dan minimalisasi peran pemerintah.

Aksi penanggulangan krisis oleh para ekonom, manajer, teknokrat, dan profesional mampu mengatur dan menstabilkan perekonomian. IMF menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan integrasi Cina dalam ekonomi global bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan sejumlah risiko finansial dan sosial yang tengah dihadapi.

Pada tahun 2004, China menarik FDI total sebesar USD 153.5 miliar, tingkat pertumbuhan 33,5 persen secara tahunan, dengan aliran FDI baru senilai USD 60.6 miliar, meningkat 13,3 persen.<sup>5</sup> Sampai dengan Januari 2005, jumlah perusahaan investasi asing yang terdaftar di China berjumlah 5.125.504 dan modal investasi mencapai USD 1109.445 miliar, dengan realisasi FDI sebesar USD 566.196 miliar. Pada tahun 2005, total PDB China mencapai 14 triliun RMB (Rp 1,6 triliun) atau lebih dari dua kali lipat PDB gabungan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Perkapita GDP China sekarang yang di sekitar USD 1.300 adalah sama dengan Indonesia tetapi lebih tinggi dari Filipina. Dengan total jumlah nominal PDB, China menduduki peringkat ke-5 perekonomian terbesar di dunia. Dari segi paritas daya beli (PPP), perekonomian China saat ini merupakan kedua terbesar di dunia

setelah Amerika Serikat.<sup>6</sup> Sebagai akibat dari kemajuan industrialisasi yang cepat, China melesat menjadi basis manufaktur terkemuka di dunia. Pada tahun 2004, China memproduksi 273 juta ton baja, 970 juta ton semen, 73 juta set TV warna, 66 juta AC, 30 juta lemari es, dan 45 juta PC.

Pada tahun 2004, China juga menjadi produsen mobil ketiga terbesar dunia, dengan total output sebesar 5,1 juta unit, setelah Amerika Serikat dan Jepang.<sup>7</sup> Pada tahun 2003, China melampaui Amerika Serikat sebagai pangsa telepon terbesar dunia (263 juta jaringan tetap ditambah 269 juta ponsel (290 pada pertengahan 2004)).<sup>8</sup> Juga, pada pertengahan tahun 2005, jumlah pengguna internet yang terdaftar di China ("netizens") telah melampaui 100 juta sehingga membentuk "Web populasi" terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.<sup>9</sup> Pesatnya pertumbuhan ekonomi China mendorong mereka melakukan ekspansi pasar besar-besaran. Ekspansi pasar meski terkesan dilakukan dengan hati-hati, cukup meresahkan negara-negara tetangga, Jepang, Korea Selatan, dan negara ASEAN, karena diikuti basis pertumbuhan ekonominya yang kuat. China telah tampil sebagai keajaiban Asia atau *The New Miracle of Asia*, sejajar dengan Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong, yang pernah disebut-sebut sebagai pusat keajaiban ekonomi Asia. Dibandingkan dengan Jepang yang tengah menjalankan program zero growth, pertumbuhan ekonomi China saat ini mencapai 8 persen. Kesuksesan ini merupakan bagian dari strategi market economy yang menjadi orientasi China pasca-Jiang Zemin. Reformasi Partai Komunis China (PKC) dalam Kongres November 2001, dengan memasukkan kelas kapitalis (shehui qita fangmian de youxiu fenzi) ke dalam unsur PKC, tidak hanya bertujuan merombak total hubungan majikan-pekerja dalam tradisi komunis China, tetapi juga memperkuat basis pendukung kapitalis China melakukan ekspansi pasar guna mempercepat pertumbuhan ekonominya.

Perekonomian China pada 2017 mengalami peningkatan. Menurut laporan Bank Dunia, besaran PDB China

pada tahun 2016 mencapai US\$11.9 triliun.<sup>49</sup> Dengan total populasi penduduk lebih dari 1,37 miliar jiwa, maka PDB per kapita China pada tahun 2016 berada di kisaran US\$14.600.<sup>50</sup> Sementara *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* memprediksi bahwa China akan mengalami perlambatan ekonominya sepanjang 2017, antara lain di picu oleh menurunnya investasi dan nilai ekspor barang dan jasa. Adapun pemicunya antara lain karena penerapan kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh negara-negara tujuan ekspor.

Menurut OECD, proyeksi angka pertumbuhan ekonomi China pada 2017 berada di kisaran 6,6%. Sedangkan faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut diantaranya adalah sektor penjualan ritel dan konsumsi dalam negeri, yang mencapai lebih dari 70% total PDB. Maraknya sistem penjualan barang dan jasa melalui e-commerce disinyalir berperan penting pada tingginya sumbangan sektor ritel dan konsumsi domestik.<sup>51</sup>

Sebagai catatan, total volume perdagangan online dalam negeri China pada 2016 mencapai hingga US\$548 miliar, dengan lebih dari 90% total transaksi dilakukan melalui perangkat seluler. Dari sisi kemudahan usaha, China menempati peringkat ke 78 dari 190 negara yang di survei oleh Bank Dunia. Adapun kriteria penilaian tersebut antara lain dilihat dari lamanya waktu pemberian izin untuk mendirikan usaha, kredit dari perbankan, aturan-aturan yang mendukung iklim usaha, hingga perlindungan terhadap investor kecil.<sup>52</sup>

Namun demikian, seperti dikutip dari *The Financial Times*, secara mengejutkan China mengalami pertumbuhan ekonomi hingga 6,9% sampai dengan semester pertama 2017.

---

<sup>49</sup> data.worldbank.org

<sup>50</sup> www.cia.go.theworldfactbook: China

<sup>51</sup> OECD Economic Surveys: China, March, 2017

<sup>52</sup> World Bank. *Doing Business 2017: Equal Opportunity for All, Economy Profile 2017: China, 2017*

Pencapaian ini banyak di dukung oleh meningkatnya penjualan di sector properti dan tingginya produktivitas di sektor produksi.<sup>53</sup> Pertumbuhan ekonomi China hingga semester pertama 2017 membuat IMF merevisi proyeksiperekonomian China di 2017 yang sebelumnya 6.5% menjadi 6.7%.<sup>54</sup> China saat ini terus mengalami pertumbuhan ekonomi. Keberhasilannya dalam melewati krisis Keuangan Asia tahun 1997 memacu Pemerintah China untuk terus meningkatkan perekonomiannya.

Sedangkan, Indonesia pada sebelum krisis sudah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Keadaan Indonesia tidak hanya kacau secara ekonomi tapi juga secara politik disebabkan oleh adanya Reformasi di saat yang sama dengan berlangsungnya krisis Keuangan Asia. Ketika krisis melanda Thailand, nilai baht terhadap dolar anjlok dan menyebabkan nilai dolar menguat. Penguatan nilai tukar dolar berimbas ke rupiah. Sekitar bulan Juli 1997, di Indonesia terjadi depresiasi nilai tukar rupiah, nilai rupiah terus merosot. Di bulan Agustus 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dari Rp2.500,00 menjadi Rp2.650,00 per dolar AS. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil.

Padahal, pada saat itu hutang luar negeri Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, sudah sangat besar. Tatanan perbankan nasional kacau dan cadangan devisa semakin menipis. Perusahaan yang tadinya banyak meminjam dolar (ketika nilai tukar rupiah kuat terhadap dolar), kini sibuk memburu atau membeli dolar untuk membayar bunga pinjaman mereka yang telah jatuh tempo, dan harus dibayar dengan dolar. Nilai rupiah pun semakin jatuh lebih dalam lagi. Krisis yang terjadi di Indonesia semakin parah antara lain disebabkan oleh stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi

---

<sup>53</sup>

[www.ft.com](http://www.ft.com). *ChinaGDPgrowthpointsto2017economicrebound*, 17 July 2017

<sup>54</sup> [www.imf.org](http://www.imf.org). IMF Country Focus: China's Economic Outlook in six charts, August 15, 2017



“ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.

Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati dalam mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan senantiasa menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani. Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar-benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta.<sup>55</sup>

Yang ikut memperburuk keadaan adalah batas waktu pinjaman (maturity) hutang swasta tersebut rata-rata makin pendek. Pada saat krisis terjadi, rata-rata batas waktu pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan, dan menjelang Desember 1997 jumlah hutang yang harus dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun adalah sebesar US\$20,7 milyar.<sup>56</sup>

Kemudian, banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan.

Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri,

---

<sup>55</sup> data.worldbank.org

<sup>56</sup> *Ibid*

konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank yang sesungguhnya tidak bermodal cukup atau kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi. Semua ini berarti, ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi, sistem perbankan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi korban langsung akibat neracanya yang tidak sehat.

Sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula. Jauh sebelum krisis terjadi, investor asing dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum. Persoalan ini sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman” yang harus dikeluarkan bila orang melakukan kegiatan bisnis di sini.

Meskipun persoalan perbankan dan hutang swasta menjadi penyebab dari krisis ekonomi, namun, kedua faktor yang disebut terakhir di atas adalah penyebab lambatnya pemulihan krisis di Indonesia. Pemulihan ekonomi musykil, bahkan tidak mungkin dicapai, tanpa pulihnya kepercayaan pasar, dan kepercayaan pasar tidak mungkin pulih tanpa stabilitas politik dan adanya pemerintahan yang terpercaya.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak awal Juli 1997, di akhir tahun itu telah berubah menjadi krisis ekonomi. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menyebabkan harga-harga naik drastis. Banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Jumlah pengangguran meningkat dan bahan-bahan sembako semakin langka. Krisis ini tetap terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang dimaksud fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, cadangan devisa masih cukup

besar dan realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus.

Kurs rupiah terhadap dollar AS melemah pada tanggal 1 Agustus 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir tahun 1997, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya dan mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk membantu bank-bank bermasalah tersebut. Namun kenyataannya terjadi manipulasi besar-besaran terhadap dana KLBI yang murah tersebut.

Tidak hanya itu, kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun, perusahaan milik Negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang akan dan telah jatuh tempo, angka pemutusan hubungan kerja meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya, kesulitan menutup APBN, biaya sekolah di luar negeri melonjak, laju inflasi yang tinggi, angka kemiskinan meningkat dan persediaan barang nasional, khususnya Sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya, harga-harga barang naik tidak terkendali dan berarti biaya hidup semakin tinggi.

Namun, pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010, seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia.

Pada saat krisis Keuangan Asia berlangsung ada beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia untuk mengurangi tekanan depresiasi Rupiah, kebijakan-kebijakan moneter yang ditempuh melingkupi berbagai hal, antara lain pelebaran band intervensi, pembatasan transaksi valuta asing oleh perbankan, perubahan system nilai tukar dan pengetatan likuiditas perbankan.

Untuk mengurangi tekanan depresiasi Rupiah, kebijakan-kebijakan moneter yang ditempuh melingkupi berbagai hal, antara lain pelebaran band intervensi, pembatasan transaksi valuta asing oleh perbankan, perubahan system nilai tukar dan pengetatan likuiditas perbankan. Berbagai langkah tidak sepenuhnya berhasil menahan laju depresiasi rupiah karena krisis dimaksud dalam waktu singkat telah berkembang dari semula krisis moneter menjadi krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis politik sehingga menjadi krisis multidimensi.

Kala itu depresiasi rupiah tetap berlangsung hingga pernah mencapai 600% dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, yaitu dari RP. 2.350,- menjadi Rp. 16.000,- per 1 USD. Sementara itu, suku bunga antar bank sempat mencapai 60% per tahun. Akibat lainnya distribusi barang sempat mengalami kemandegan menunggu kestabilan harga dan keamanan, terutama karena terjadi demonstrasi dan

pengerusakkan pusat-pusat perdagangan oleh massa di berbagai kota. Hingga akhir periode ini, pertumbuhan ekonomi menurun 13,7%, harga barang-barang melonjak, perusahaan-perusahaan gulung tikar, pengangguran meningkat dan berberapa fasilitas umum serta pusat perdagangan rusak berat.

Pada periode ini kebijakan devisa yang dianut masih devisa bebas berdasarkan PP No. 1 tahun 1982 yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang No 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Pada periode ini kebijakan devisa yang dianut masih devisa bebas berdasarkan PP No. 1 tahun 1982 yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang No 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa setiap penduduk bebas memiliki dan menggunakan devisa, namun wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya.

Atas dasar pengaturan tersebut maka Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi devisa maupun dalam pengelolaannya. Sementara itu, pemilikan dan penggunaan devisa oleh masyarakat umum belum diatur system pelaporannya. Berbagai kebijakan pada periode sebelumnya, khususnya dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun pinjaman luar negeri, telah meningkatkan cadangan devisa di awal tahun 1997, apalagi investor asing semakin tertarik menanamkan dana di Indonesia.

Sejak awal paruh kedua Juli 1997, nilai tukar Rupiah terdepresiasi terhadap valuta asing, terutama USD. Demikian cepatnya proses penurunan Rupiah tersebut terjadi sehingga menimbulkan kepanikan pasar. Sejak awal paruh kedua Juli 1997, nilai tukar Rupiah terdepresiasi terhadap valuta asing, terutama dolar AS. Demikian cepatnya proses penurunan Rupiah tersebut terjadi sehingga menimbulkan kepanikan pasar. Berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tidak berhasil menghentikan laju penurunan nilai tukar tersebut, baik dalam bentuk pelebaran band intervensi, pengetatan likuiditas perbankan maupun moral suasi kepada para pelaku pasar. Untuk menyelamatkan cadangan devisa maka pada tanggal 14 Agustus 1997 band intervensi dilepas dan selanjutnya Indonesia menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang hingga sekarang. Sistem ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No.23 dan 24 Tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa sistem nilai tukar di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendengar rekomendasi dari Bank Indonesia. Hal ini dilakukan karena sistem nilai tukar akan berdampak sangat luas, tidak saja terhadap kegiatan bidang moneter dan sektor keuangan, tetapi juga kegiatan ekonomi riil.

Melemahnya nilai tukar rupiah yang berkepanjangan mengakibatkan beban pembayaran hutang luar negeri meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagian hutang luar negeri swasta tidak dilindungi nilai, penggunaan hutang jangka pendek untuk pembiayaan usaha jangka panjang, serta hutang luar negeri yang dipergunakan untuk pembiayaan usaha yang berorientasi domestik. Melemahnya nilai tukar rupiah yang berkepanjangan mengakibatkan beban pembayaran hutang luar negeri meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagian hutang luar negeri swasta tidak dilindungi nilai, penggunaan hutang jangka pendek untuk pembiayaan usaha jangka panjang, serta hutang luar negeri yang dipergunakan untuk pembiayaan usaha yang berorientasi domestik. Di

samping itu, melemahnya nilai tukar juga menurunkan kepercayaan kreditur terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali hutang-hutangnya. Akibatnya, sektor swasta mengalami kesulitan mendapatkan roll over bagi utang yang jatuh tempo dan mengakibatkan krisis hutang swasta. Kebijakan yang ditempuh dalam penyelesaian hutang luar negeri swasta, tim penyelesaian hutang luar negeri swasta yang didukung oleh Pemerintah melakukan serangkaian perundingan dengan kreditur luar negeri yang diwakili oleh *Bank Steering Committee*. Perundingan yang dilakukan di Frankfurt pada 4 Juni 1998 mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian pinjaman antara bank, pinjaman perusahaan swasta dan pembiayaan perdagangan. Penyelesaian utang antar bank dilakukan melalui program pertukaran hutang antarbank (*exchange offer*). Pada tahap pertama pinjaman yang dipertukarkan adalah pinjaman yang jatuh waktu sampai dengan 31 Maret 1999 yang dijadwalkan kembali menjadi pinjaman baru dengan maksimum jatuh waktu 4 tahun. Jumlah pinjaman bank nasional kepada kreditur luar negeri yang sudah dipertukarkan mencapai US\$ 3miliar dengan melibatkan 41 bank peserta. Dari jumlah tersebut, yang dijadwalkan kembali dengan jatuh waktu 1 tahun sebesar 13,3%, 2 tahun 26,6%, 3 tahun 48,0%, dan 4 tahun 12,1%. Berkaitan dengan penyelesaian hutang luar negeri jangka pendek perusahaan swasta, Pemerintah membentuk INDRA yang berfungsi sebagai lembaga perantara antara perusahaan debitur dan kreditur luar negeri. Dalam perkembangannya, INDRA melakukan penyesuaian atas skim-skim kredit tersebut. Berkaitan dengan program INDRA, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Prakarsa Jakarta yang berfungsi sebagai fasilitator bagi perusahaan-perusahaan yang menghadapi masalah dalam menyelesaikan pinjamannya sehingga debitur dapat memilih untuk mengikuti program INDRA atau memilih cara lain, seperti *debt to equity swap* dan upaya penyelesaian di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun 1998 satuan tugas tersebut telah menangani 122 kasus dengan nilai utang sebesar USD15,5 milyar. Dalam hal hutang luar

negeri sektor pemerintah, dilakukan upaya restrukturisasi melalui penandatanganan MOU Paris Club pada 23 September 1998 dengan kreditur yang diwakili oleh 17 negara donor. Perjanjian tersebut menandai adanya penjadwalan kembali kewajiban pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dalam masa konsolidasi, yakni terhitung sejak awal Agustus 1998 hingga akhir Maret 2000. Berdasarkan MOU Paris Club, pinjaman yang akan direstrukturisasi berjumlah USD4,2 milyar, terdiri dari pinjaman lunak sebesar USD1,2 milyar dan fasilitas kredit ekspor sebesar USD3 milyar. Pinjaman lunak dijadwalkan kembali atau dibiayai dengan pinjaman baru berjangka waktu 20 tahun, termasuk masa tenggang 5 tahun dengan tingkat bunga yang berlaku bagi pinjaman lunak. Fasilitas kredit ekspor dibiayai kembali atau dijadwalkan dengan jangka waktu 11 tahun, termasuk masa tenggang 3 tahun dengan tingkat bunga pasar.

Sedangkan, China juga melakukan beberapa upaya dalam menghadapi krisis tersebut yang pertama adalah menerapkan kebijakan pintu terbuka atau *open door policy* dengan menciptakan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) di provinsi pesisir selatan, yang pada dasarnya merupakan zona pemrosesan ekspor yang terbuka untuk perdagangan internasional dan investasi asing.

Kedua, China juga menciptakan Zona Perdagangan Bebas dan Zona Pengembangan Teknologi Tinggi, yang diarahkan untuk menarik investasi asing di sector teknologi dan mempromosikan penelitian dan pengembangan. Hal ini memberikan perlindungan bagi para investor asing yang tidak dinikmati oleh perusahaan dalam negeri atau China.

Ketiga, Pemerintah China melonggarkan kontrol pada akun giro, namun masih memperhatikan serangkaian kontrol pertukaran pada akun modal. Langkah keempat, Pemerintah China juga bijak dalam mengontrol arus masuk modal atau investasi dan juga menggunakan kebijakan moneter yang terkendali.



Kelima, Pemerintah China memberikan kebebasan pada penduduk maupun bukan penduduk agar dapat membeli mata uang asing untuk transaksi modal atau meminjam Rennomibi untuk penjualan ke depan secara bebas namun dalam jumlah yang telah dibatasi oleh Pemerintah.

Terakhir, China mampu mengatur dengan baik arus modal yang masuk berbentuk investasi langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI), yaitu investasi riil di pabrik, peralatan modal, dan fasilitas produktif lainnya.

Hubungan bilateral yang terjalin antara China dengan negara-negara di Asia, khususnya Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, ataupun negara-negara di luar Kawasan Asia Tenggara pun masih tetap berlangsung setelah adanya krisis keuangan Asia.

Hubungan bilateral antara China dan Thailand yaitu Cina bekerja sama dengan Thailand untuk mempersiapkan peluncuran proyek kereta api secepatnya. Saat memperingati 40 tahun hubungan diplomatik antara Cina dan Thailand pada 2015, Wang Yi Menlu Cina, mengatakan ia berharap kedua pihak akan memperkuat persahabatan tradisional mereka dan meningkatkan kerja sama dalam meningkatkan kemitraan strategis yang komprehensif, menyoroti target peningkatan perdagangan bilateral menjadi 100 miliar dolar AS pada 2015. Wang juga menekankan bahwa Cina menganggap hubungan dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai prioritas dalam diplomasi lingkungan dan menyambut dorongan ASEAN untuk mengubah blok sepuluh negara menjadi satu komunitas. ASEAN didirikan pada 1967, beranggotakan Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Kelompok 10 negara itu mencanangkan 31 Desember 2015 sebagai realisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, wilayah arus bebas barang, jasa, tenaga kerja terampil, modal dan investasi. Berasal peran Thailand dalam mempromosikan

hubungan Cina-ASEAN, Wang mengatakan Beijing bersedia untuk bekerja sama dengan Thailand mengenai penandatanganan perjanjian Cina-ASEAN guna kerja sama baik, peningkatan arus zona perdagangan bebas Cina-ASEAN serta meningkatkan kerja sama maritim.

Sementara itu, Prayut Perdana Menteri Thailand mengatakan bahwa Thailand berkomitmen untuk mengangkat hubungan bilateral dan siap untuk melaksanakan penawaran dengan Cina mengenai kerja sama kereta api dan produksi perdagangan pertanian, meningkatkan perdagangan, investasi dan kerja sama keuangan serta pertukaran orang-per-orang untuk keuntungan rakyat kedua negara.

Prayut menyambut perusahaan Cina untuk mendirikan pabrik di Thailand, katanya. Dia juga mengatakan Cina memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas dan pembangunan di wilayah tersebut dan bahwa Thailand akan bekerja sama erat dengan Beijing untuk meningkatkan hubungan ASEAN-Cina serta kerja sama regional.

Yang keempat, Cina dengan Singapura. Hubungan Cina dengan Singapura dalam perdagangan ekonomi bilateral meningkat dari US \$ 5,2 Milyar mencapai US \$ 21.6 Milyar dari tahun 1990 sampai 2000, hamper mencapai empat kali lipat dalam satu dekade. Dari 2000 sampai 2007, dari US \$ 21.6 Milyar mencapai 91,6 Milyar. Pada tahun 2006, Cina telah menjadi Partner perdagangan terbesar Singapura, setelah Malaysia, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2008, Singapura dan Cina memutuskan sebuah Perdagangan Bebas (FTA) selama periode Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengunjungi Beijing. Perdagangan Bebas ini merupakan hal pertama bagi pemerintah Cina dengan Negara Asia. Hal itu menggambarkan bahwa kedua negara, Cina dan Singapura sepakat untuk membuka hubungan yang terbuka, dan mempromosikan perdagangan bebas. Kesepakatan ini juga diharapkan memaju investasi dan perdangan yang lebih kuat

antara kedua negara. China-Singapura Suzhou Industrial Park adalah salah satu taman industry internasional dengan teknologi tinggi, mirip seperti taman urban modern disekitar danau Jinji.

Berikutnya, hubungan kerjasama antara China dan ASEAN. C-AFTA merupakan regionalisasi perdagangan bebas antara negara China dan ASEAN. Latar belakang munculnya gagasan tersebut adalah menilik pergeseran keseimbangan kekuatan ekonomi yang mulai bergerak ke arah “Kerajaan Timur Tengah” (middle kingdom) saat ini. Sehingga perlu adanya usaha untuk membentuk suatu integrasi perekonomian di negara ASEAN dan China.

Kerjasama C-AFTA ini merupakan bentuk dari kerjasama perdagangan dan ekonomi diwilayah ASEAN dan China yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan dimana tidak ada hambatan tarif maupun non tarif bagi negara-negara ASEAN dan China. C-AFTA ini juga meliputi wilayah perdagangan bebas yang mencakup seluruh kawasan sepuluh negara anggota ASEAN (2002) dan sejak tahun 2003 termasuk Cina. Arus lalu lintas perdagangan yang berasal dari negara peserta bebas keluar masuk hanya dengan hambatan tarif bea masuk maksimal 5% dan pada tahun 2010 tarif produk- produk tersebut akan dihapus menjadi 0%.

Pembentukan C-AFTA diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dan China dengan menjadikan ASEAN dan China sebagai basis produksi pasar dunia, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meratakan kesejahteraan ekonomi dengan banyak terbukanya lapangan kerja. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN dan China.

Adanya kerjasama China-Asean Free Trade Agreements (C-AFTA) sebagai bentuk pengembangan market yang lebih luas. Dengan jumlah total penduduk mencapai 1.7-1.8 miliar jiwa, pasar China – ASEAN merupakan pasar yang luar biasa luas dan potensial untuk seluruh anggota ASEAN dan China sendiri. Dengan total penduduk sekian banyak – mencapai sekitar 30% total penduduk dunia, adalah kekuatan ekonomi yang tidak main-main.

Apalagi jika nantinya FTA (Free Trade Area) makin terbuka bukan semata C-AFTA, tapi ditambah dengan India, Taiwan, Jepang, dan kemungkinan Australia, bukan tak mungkin akan menjadi kekuatan ekonomi (dan politis, mungkin) terbesar di dunia. Jumlah penduduk akan mencapai 50% total penduduk dunia dan bisa dibayangkan berapa besar kekuatan ekonominya.

Dan juga China aktif dalam mengikuti organisasi internasional, yang mana hal ini menunjukkan China juga menganut paham liberalisme. Keikutsertaan China dalam berbagai kerjasama ekonomi menunjukkan besarnya kepentingan nasional China terhadap pemenuhan tuntutan dan kebutuhan ekonomi domestik. Hal ini juga sekaligus digunakan China untuk membantu menuntaskan masalah-masalah domestik yang berkaitan dengan ekonomi seperti kemiskinan dan keterbelakangan. Begitu banyak kerjasama ekonomi yang diikuti oleh China, seperti World Trade Organisation (WTO), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Shanghai Cooperation Organisation (SCO), ASEAN Plus Three (APT), G-20, dan juga OPEC. Dalam konteks regional, China dan ASEAN telah menyepakati dibentuknya zona perdagangan bebas China-ASEAN (ASEAN-China Free Trade Area, ACFTA) yang diberlakukan bagi semua negara ASEAN sejak Desember 2009. Dalam keikutsertaan China di berbagai forum ekonomi dunia tersebut, China telah menunjukkan bahwa mereka merupakan mesin penggerak ekonomi dunia, dengan cadangan devisa 1,8 Triliun Dollar AS per Mei 2008. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Perdagangan

China, China merupakan negara pengekspor terbesar ketiga dunia dengan peningkatan total GDP sebesar 12 % di volume 3,24 triliun Dollar AS. Oleh karena itu China merupakan negara pengekspor terbesar di Asia. Kenyataan tersebut membuat China menempati posisi dan peranan penting dalam ekonomi dunia.

Hubungan Eropa-China memang telah memasuki babak baru dimana Uni Eropa mulai menunjukkan soliditasnya, disamping itu China juga telah menunjukkan geliat ekspansi ekonominya di Eropa. Presiden Perancis Jacques Chirac pernah melakukan kunjungan kenegaraannya ke China pada tahun 2004. Kunjungan tersebut ditujukan untuk melakukan pendekatan ke China atas kontrak pesawat Airbus, Kereta Api Alstom, pusat pengolahan air, peralatan hidroelektrik, dan juga ekspor gandum seharga 5 miliar Euro. China adalah negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang juga memiliki hak veto di PBB. China merupakan salah satu dari negara penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB, yaitu sebanyak 1.955 pasukan yang tersebar di 12 misi perdamaian PBB pada bulan Juni 2008. China telah mengikuti lebih dari 130 organisasi internasional dan juga telah menyatakan komitmennya terhadap 267 perjanjian-perjanjian multilateral.

Sebagai kekuatan baru yang berpengaruh, China sedang melakukan penyesuaian terhadap sistem internasional yang didominasi oleh kekuatan negara-negara Barat. China merupakan negara yang memegang peranan penting dalam PBB dan juga WTO. China memandang bahwa keikutsertaannya dalam PBB dan WTO merupakan sarana untuk mempromosikan tujuan-tujuan strategis dan juga prinsip-prinsip yang diyakini oleh China. Keikutsertaan tersebut diiringi dengan upaya meyakinkan bahwa China memiliki komitmen terhadap hukum internasional yang berlaku, prinsip persamaan, demokratisasi di tingkat internasional, serta memastikan dunia terhadap prinsip China atas perdamaian dan responsibilitas. Keikutsertaan China dalam Shanghai

Cooperation Organization (SCO) di Asia Tengah dan ASEAN Plus Three di Asia Tenggara dapat dijadikan contoh.

Selain China, Indonesia juga aktif dalam mengikuti organisasi internasional antara lain seperti ASEAN, OKI, APEC, AFTA, G20, PBB, dan lain sebagainya. Setelah krisis Keuangan Asia terlewati, Indonesia juga masih aktif menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence dan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyaksikan penandatanganan 11 kesepakatan kerja sama perdagangan dan investasi lebih dari USD10 miliar atau Rp133 triliun. Dalam kesepakatan tersebut, AS akan mendatangkan teknologi mutakhirnya guna mendukung kebutuhan energi di Indonesia dan mendukung proses limbah menjadi produk sampingan bernilai tinggi.

Dubes AS menyampaikan kesepakatan ini memperlihatkan dukungan perusahaan-perusahaan AS terhadap upaya Indonesia untuk mendapatkan energi yang lebih bersih melalui pengembangan sumber daya panas bumi dan pasokan gas alam cair secara jangka panjang.<sup>57</sup> Selain itu, melalui pengadaan peralatan teknologi mutakhir AS, Indonesia akan meningkatkan kemampuannya untuk menyediakan energi terbarukan dengan harga terjangkau. Dalam kesempatan yang sama, juga ditandatangani dua kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama di sektor penerbangan dan pertahanan.

Selanjutnya, Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura, Lee Hsien Loong telah bertemu dalam kerangka Leaders' Retreat di Singapura. Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI dan PM Singapura menyambut baik berbagai perkembangan positif dalam hubungan bilateral,

---

57

khususnya sejak Leaders' Retreat di Bogor pada bulan Maret 2013. Kedua Pemimpin juga menegaskan kembali komitmen bersama untuk senantiasa memajukan dan memperkuat hubungan bilateral ke depan. Kedua Pemimpin secara khusus menyambut gembira perkembangan hubungan bilateral di bidang ekonomi dan telah terbangun sangat baik. Hubungan perdagangan telah secara konsisten bergerak ke arah yang positif selama beberapa tahun terakhir.

Dalam hal ini, Singapura merupakan negara asal investor terbesar bagi Indonesia, sementara Indonesia merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Singapura diantara negara-negara ASEAN lainnya. Presiden RI dan PM Singapura menyambut baik perkembangan positif dalam enam working group di bidang ekonomi yang terbentuk sejak Leaders' Retreat 2010. Working Group Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Kawasan Ekonomi Khusus lainnya dan Working Group di bidang Investasi telah berhasil meningkatkan investasi di BBK dan kawasan lain, termasuk Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Working Group di bidang Ketenagakerjaan telah semakin memperkuat upaya pengembangan sumber daya manusia. Working Group di bidang Perhubungan Udara telah memperluas hubungan udara di antara kedua negara, sementara Working Group di bidang Pariwisata terus menggali potensi dalam bidang cruise tourism dan pengembangan Meeting, Incentives, Conference and Exhibitions (MICE) guna meningkatkan arus wisatawan.

Selanjutnya, Working Group di bidang Agribisnis telah berhasil memperkuat kemitraan antara importir dari Singapura dan pengusaha Indonesia, sekaligus meningkatkan volume ekspor buah dan sayuran Indonesia ke Singapura. Di bidang kontra-terorisme, kedua Pemimpin menyambut baik penguatan kerja sama bilateral di bidang penanggulangan terorisme dalam kerangka Working Group. Disamping itu, kedua Pemimpin juga membahas upaya bersama untuk

meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, pariwisata, lingkungan hidup, pertahanan dan intelijen.

Hubungan Indonesia dan Brunei Darussalam bisa dibilang sangat hangat dan ramah, tidak ada masalah satupun yang terjadi antara kedua belah pihak, bahkan saat Indonesia sedang krisis ekonomi, Brunei Darussalam tetap menjaga kerjasama antara kedua belah pihak.

Pada bulan November 1999, kedua negara sepakat untuk membentuk Komisi Bersama pada tingkat Menlu untuk menggali berbagai potensi kerjasama di antara kedua negara. Pertemuan Komisi Bersama yang pertama berlangsung di Jakarta tanggal 25 Juli 2003, sementara pertemuan kedua (terakhir) diadakan di Bandar Seri Begawan tanggal 18 Agustus 2006.

Pada kesempatan tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang antara lain perdagangan, kebudayaan, pertahanan, kesehatan, penerangan, ketenagakerjaan serta mendorong peningkatan hubungan antarswasta dan masyarakat kedua negara.

Dalam ketenagakerjaan Brunei Darussalam merupakan salah satu negara destinasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pada tahun 2012 terdapat sekitar 58.000 Warga Negara Indonesia bekerja atau menjadi TKI di Brunei Darussalam. Kebanyakan TKI di Brunei Darussalam bekerja sebagai pegawai swasta, pekerja rumah tangga, buruh di kilang minyak dan lain sebagainya.

Kerja sama yang masif selanjutnya antara Indonesia dan Brunei Darussalam adalah dalam bidang perdagangan. Dalam bidang ini kedua negara bekerja sama karena kedua negara saling melengkapi dalam beberapa sektor. Brunei memiliki komoditas mineral yang mereka andalkan sebagai barang ekspor mereka terhadap Indonesia. Brunei mengekspor



minyak, gas alam, *transport equipment*, *cached head petroleum* dan *machinery*. Sedangkan Indonesia memiliki komoditas industri, diantaranya mie instan, makanan bayi, minuman ringan, obat-obatan, jamu, kosmetik, alat-alat listrik dan elektronik, tekstil, furniture, bahan bangunan, peralatan olahraga, rokok, kendaraan bermotor dan suku cadangnya.

Nilai total perdagangan antara Indonesia dan Brunei Darussalam pada tahun 2008 mencapai US\$ 2,476 milyar, naik dari total perdagangan tahun 2007, yaitu sejumlah US\$ 1,9 milyar. Pertumbuhan pendapatan kedua negara karena hubungan yang terjalin terus meningkat setiap tahunnya. Diatas 10% setiap tahunnya. Neraca perdagangan kedua negara khususnya selama lima tahun terakhir menunjukkan defisit bagi Indonesia. Hal ini karena Indonesia banyak mengimpor minyak dari Brunei Darussalam.

Selain perdagangan, Indonesia juga menawarkan Brunei untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia mempromosikan keadaan ekonomi yang kondusif, iklim investasi yang bagus dan kebijakan fiskal yang tidak menyulitkan investor. Ada beberapa sektor investasi yang ditawarkan kepada Brunei Darussalam, yaitu proyek infrastruktur seperti energi (10,000 MW) dan pembuatan jalan tol Trans Jawa. Semua ini dijadikan senjata andalan untuk menarik investor agar tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam terjalin baik, dalam sektor perdangan kedua negara memiliki kepentingan yang saling melengkapi, hal ini membuat hubungan berjalan semakin baik. Dari tahun ke tahun hubungan kedua negara tak mengalami masalah yang berarti sehingga membuat hubungan keduanya mengalami peningkatan yang signifikan dan menguntungkan.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brasil berjalan dengan baik. Kerjasama dalam bidang perdagangan terjadi dalam hal pemasaran kopi. Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Brasil. Brasil dan Indonesia tergabung dalam Coffee Agreement. Ekspor Indonesia ke Brasil meliputi karet alam, pakaian jadi, dan barang-barang elektronik. Impor Indonesia dari Brasil meliputi, dan makanan ternak. Selain itu, Indonesia dan Kanada menjalin hubungan diplomatik. Antara Indonesia dan Kanada telah terjalin hubungan dagang. Indonesia mengimpor obat-obatan dan bahan kimia dari Kanada.